

## **BAB 1V**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil KPRI Mataram Pademawu**

###### **a. Sejarah Berdirinya KPRI Mataram Pademawu**

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mataram Pademawu telah berdiri sejak tahun 1970. Latar belakang berdirinya koperasi yaitu saat orde baru pemerintah memiliki program pemberian sembako berupa beras khusus diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS). Sembako tersebut harus disalurkan melalui sebuah koperasi, sehingga beberapa PNS kabupaten pamekasan mengadakan kesepakatan untuk mendirikan sebuah koperasi, yang kemudian koperasi tersebut didirikan di desa Pademawu Barat. Selain itu, terdapat beberapa alasan lain dalam berdirinya koperasi ini yaitu untuk mendapatkan kesejahteraan bersama dan meningkatkan perekonomian antar anggota.<sup>70</sup>

Melihat banyaknya pegawai negeri yang berminat pada koperasi ini, maka koperasi memutuskan untuk melengkapi legalitasnya agar mendapatkan pengakuan yang sah oleh pemerintah dan masyarakat khalayak. Sehingga, pada tanggal 31 Maret 1970 telah resmi koperasi terdaftar dalam akta notaris dengan nomor Badan Hukum: 50/BH/II/30-70, serta pada tanggal 4 februari 1997 koperasi mengadakan perubahan Anggaran Dasar.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mataram, bertempat di jalan Raya Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Bentuk koperasi

---

<sup>70</sup> Samsul Arifin, Karyawan KPRI Mataram Pademawu, Wawancara Langsung (12 Januari 2021)

ini berupa koperasi primer kabupaten dengan jenis koperasi konsumen dan kelompok koperasi pegawai negeri (KPRI). Kelompok Pegawai negeri pada KPRI Mataram Pademawu adalah PNS yang instansinya dalam lingkungan Dinas Pendidikan. Keanggotaan KPRI Mataram Pademawu bersifat stelsel aktif yang artinya calon anggota dengan kesadaran sendiri mendaftar sebagai anggota KPRI Mataram Pademawu Kab. Pamekasan. Selanjutnya perkembangan data anggota yang tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Anggota KPRI Mataram**

Tahun	Awal Tahun			Mutasi						Akhir Tahun		
	L	P	JML	MASUK			KELUAR			L	P	JML
2016	283	165	447	1	7	8	28	14	42	256	157	413
2017	256	157	413	4	2	6	18	10	28	242	149	391
2018	242	149	391	1	4	5	21	12	33	222	141	363
2019	222	141	363	4	3	7	31	8	39	195	136	331

Sumber: Dokumen KPRI Mataram Pademawu

Dalam menjalankan aktivitas koperasi, terdapat sebuah motto koperasi sebagai harapan dapat menjadi sebuah penyemangat dan motivasi bagi pengurus koperasi, anggota dan masyarakat khalayak. Motto koperasi, berbunyi: “Siap mengemban amanah dengan kerja keras, tegas, cerdas, tangkas, ikhlas, lugas”<sup>71</sup>

<sup>71</sup> KPRI Mataram Pademawu, *Profil KPRI..*

KPRI Mataram memiliki beberapa tujuan, yaitu: menumbuhkan penalaran efektif dalam memahami perkoperasian, melejitkan KPRI Mataram melalui selektifitas perangkat koperasi, menjadikan KPRI Mataram untuk berperan menjadi sokoguru perekonomian anggota, meningkatkan komitmen dengan saran dan kritik konstruktif, dan bersinergi dalam menjaga kewibawaan koperasi. Dari beberapa tujuan tersebut, KPRI Mataram dalam segala aktivitasnya dijalankan dengan menerapkan sebuah strategi, antara lain: Menjalankan RAT tepat waktu; Optimalisasi fungsi stakeholder koperasi; Mengutamakan musyawarah dalam segala persoalan; Pengelolaan keuangan transparan, akuntabel dan auditable; Menyerap dana anggota dan mengusahakan pinjaman lunas.

#### **b. Visi dan Misi**

Adapun visi dari KPRI Mataram Pademawu yaitu terwujudnya koperasi mandiri dan sejahtera. Adapun dalam mencapai visinya, terdapat beberapa misi yang ditetapkan oleh KPRI Mataram Pademawu, yaitu: Meningkatkan kesetikawanan dan kesadaran pribadi; Menumbuhkan semangat dan kesadaran berkoperasi; Meningkatkan komitmen pengurus dan pengawas; Melaksanakan tertib manajerial; Tertib administrasi.<sup>72</sup>

#### **c. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi koperasi merupakan susunan atau kerangka dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola koperasi yang dibentuk dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

---

<sup>72</sup> KPRI Mataram Pademawu, *Profil KPRI "MATARAM"*.

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPRI Mataram Pademawu**



Sumber: Dokumen KPRI Mataram Pademawu

Berdasarkan struktur organisasi tersebut pengurus dan pengawas koperasi dipilih melalui Forum Rapat Anggota Tahunan, untuk masa bakti pengurus berdasarkan yang tercantum dalam AD (Anggaran Dasar) koperasi yaitu 3 (tiga) tahun masa jabatan. Adapun susunan pengurus beserta masa jabatannya untuk periode tahu 2019-2021, yaitu:

**Tabel 1. 2 Pengurus KPRI Mataram**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dinas	Masa Bakti	Tugas
1.	Drs. H.M. Sahid, M.Pd	Ketua	Pengawas	2 tahun	Penanggung jawab dan koordinasi
2.	Saniman, M.Pd	Sekretaris	Kep. Sekolah	2 tahun	Administrasi

3.	Sahari, S.Ag	Bendahara 1	Purna	2 tahun	Pengelola USP
4.	Ach. Suprpto S.Pd	Bendahara 2	Kep. Sekolah	2 tahun	Membantu Bendahara 1
5.	H. Ganibudin, S.Pd.I	Pembantu Umum	Kep. sekolah	2 tahun	Kordinator pengihan piutang

Sumber: Dokumen KPRI Mataram Pademawu

Badan pengawas memiliki tugas yaitu mengawasi terhadap jalannya kegiatan KPRI Mataram yang menyangkut organisasi, keuangan dan kemajuan KPRI dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan untuk tugas karyawan yaitu yang pertama memberikan pelayanan kepada anggota berupa: pendaftaran menjadi anggota baru; memberikan keterangan keanggotaan aktif KPRI Mataram; memberikan pelayanan persewaan; bertanggung jawab atas keberhasilan dan keamanan kantor; serta menerima pendaftaran peminjam. Tugas yang kedua yaitu mendokumentasikan surat masuk dan keluar, melaksanakan tugas ruti pembukuan administrasi, membuat surat keluar untuk kepentingan koperasi dan membuat data-data koperasi.<sup>73</sup>

## 2. Ruang Lingkup Usaha

KPRI Mataram Pademawu merupakan badan usaha yang bergerak disektor jasa keuangan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, koperasi memiliki beberapa kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankannya. Kegiatan yang pertama adalah melakukan simpanan, dimana anggota melakukan simpanan kepada koperasi berupa simpanan pokok yang dibayar sekali selama menjadi

<sup>73</sup> KPRI Mataram Pademawu, *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus & Pengawas*

anggota yaitu sebesar Rp. 100.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000. Simpanan tersebut merupakan sumber modal bagi koperasi yang kemudian dikelola oleh pihak pengurus. Kemudian ada simpanan sukarela, dimana simpanan ini merupakan simpanan yang akan diberikan saat pembagian THR yaitu sejumlah Rp. 125.000 yang dibayar tiap bulan, sehingga jumlah THR yang diterima anggota pada tahun 2020 yaitu Rp. 1.750.000 sedangkan THR pada tahun 2018 yaitu sekitar Rp. 1.600.000, serta anggota juga membayar iuran untuk dana sosial sebesar Rp. 10.000.<sup>74</sup>

Koperasi memiliki bidang usaha yang dijalankan dalam melayani anggota dan non anggota. Adapun bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi adalah unit simpan pinjam, cicilan barang, persewaan, paket umroh dan haji, kredit sepeda motor dan kredit computer, laptop, Hp, dll. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H. Sahari selaku bendahara KPRI Mataram Pademawu, mengatakan bahwa bidang usaha koperasi terdiri dari:

“Ya, satu USP (Unit Simpan Pinjam), dua persewaan, tiga bila ada anggota yang mau umroh dan haji, apabila orang butuh sepeda motor, itu kita bayar ke dealer, dan orang yang pinjam itu ambil sendiri ke dealer, cicilan sama dengan USP, jasanya sama, bayar tiap bulan, kalau Haji dan Umroh tanpa jasa dan keuntungan koperasi adalah anggota bisa mendapatkan haknya tanpa memberatkan anggota, karena itu urusan ibadah. Dan karena telah diputuskan dalam rapat bahwa untuk kepentingan ibadah tidak menggunakan jasa (keuntungan) karena uangnya itu milik anggota dan untuk anggota.”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> KPRI Mataram Pademawu, *Lapaoran Pertanggung Jawaban Pengurus & Pengawas*


<sup>75</sup> H. Sahari, Bendahara KPRI Mataram Pademawu, Wawancara Langsung (12 Januari 2021)

**Gambar 2. 1 Ketentuan Pinjaman**

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI)  
**"MATARAM"PADEMAWU**  
 Badan Hukum Nomor : 050/BB/RI/20.70 Sekretariat: Desa Pademawu Barat kec. Pademawu Kab. Pamekasan

**KETENTUAN PINJAMAN**

- DATANG KE KP -RI MATARAM UNTUK MENERIMA PENJELASAN KARYAWAN DAN AMBIL BLANGKO
- PINJAMAN HANYA MELAYANI ANGGOTA KP -RI MATARAM
- PINJAMAN MAXIMAL Rp. 20.000.000,- DENGAN JASA 1,5%
- LAMA ANGSURAN 20 KALI
- REKOMENDASI PIMPINAN INSTITUSI & DITAMBAH KA/BENDAHARA CAB.DISDIK BAGI JAJARAN SD
- REKOMENDASI KETUA KP-RI MATARAM
- PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA, DI KANTOR KP -RI MATARAM
- DIKENAKAN BIAYA ADMINISTRASI
- PEMINJAM TIDAK DIASURANSIKAN
- KOMPENSASI. JIKA LEBIH DARI 1/2 DARI LAMA ANGSURAN
- PELUNASAN BELUM WAKTUNYA DIKENAKAN 1 KALI JASA
- JIKA PEMINJAM WAFAT KP-RI MEMBERI BANTUAN MAX. Rp.5.000.000

 Ketua,  
 HM SAHID

Sumber: Dokumen KPRI Mataram Pademawu

**Gambar 2. 2 Alur Peminjaman**



Sumber: Dokumen KPRI Mataram Pademawu

Dari hasil wawancara dan berdasarkan dokumen di koperasi untuk bidang usaha dapat diuraikan bahwa untuk unit simpan pinjam merupakan usaha andalan koperasi, dimana anggota memiliki minat yang cukup tinggi dalam memajukan koperasinya sehingga anggota tetap melakukan transaksi pada unit simpan pinjam. Untuk usaha cicilan barang, kredit sepeda motor, kredit alat elektronik, koperasi bekerja sama dengan penyalur barang dimana koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota ke penyalur barang, dan untuk alur pembayarannya sama seperti USP di koperasi, hanya saja perbedaannya berupa barang, jadi anggota melakukan angsuran berdasarkan harga yang dibeli koperasi dan jasa/keuntungan sama seperti USP. Untuk paket umroh dan haji merupakan pelayanan kepada anggota yang memiliki keinginan untuk haji dan umroh secara kredit, dimana system pembayarannya sama seperti USP, namun tidak dikenakan jasa/keuntungan. Untuk bidang usaha yang terakhir adalah persewaan, dimana pelayanan persewaan ini tidak hanya untuk anggota tapi bisa untuk umum. Persewaan ini berupa perlengkapan pernikahan, seperti baki, gedung, kursi, sendok dan piring.<sup>76</sup>

Berdasarkan kegiatan usaha tersebut dalam memperoleh pelunasan pembayaran angsuran dan keuntungannya dilakukan dengan cara, yaitu untuk pinjaman pembayarannya dilakukan dengan pemotongan gaji anggota, dimana pemotongan gaji dilakukan oleh bendahara dinas, bendahara cabang dan bendahara sekolah di instansi masing-masing. Sedangkan untuk persewaan dapat dilakukan dengan cara membayar langsung ke kantor koperasi, baik itu dibayar saat melakukan pesanan atau dibayar setelah barang yang disewa dikembalikan.

---

<sup>76</sup> KPRI Mataram Pademawu, *Laporan Pertanggung Jawaban pengurus*



Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sahari Selaku Bendahara KPRI Mataram Pademawu, mengatakan bahwa:

“Kalau pinjaman itu pembayarannya tiap bulan sekali kita potong dari gaji, kalau persewaan ada dua hal bisa dibayar dimuka bisa dibayar setelah selesai, kalau tahun 2018 ini memang dulu dipotong oleh bendahara dinas, bendahara cabang dan semua bendahara yang ada disekolah itu smp, dll. Bendahara semua yang motong dan tiap-tiap pemotong itu karena dari dulu saya tidak dapat merubah yaitu 1% feenya. Untuk alurnya kita nyetor nama-nama guru untuk potongan simpanan, untuk potongan cicilan dan sebagian nyetor ke dinas, nyetor ke bendahara cabang, nyetor ke SMP ke bendahara sekolahnya, yang SMA juga ke bendahara sekolahnya”<sup>77</sup>

### **3. Data Lapangan**

Keberhasilan suatu perusahaan dapat diketahui melalui laba yang yang dihasilkan dalam laporan keuangannya. Dalam ruang lingkup koperasi laba dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Perolehan SHU tersebut dibentuk oleh pendapatan dan beban, sehingga perlu adanya kebijakan prinsip atau metode yang digunakan dalam pencatatan pendapatan dan beban untuk menghasilkan laba/rugi yang wajar dalam laporan keuangan. Salah satu prinsip yang penting adalah mengenai metode pengakuan, karena hal tersebut menjadi penentu kritis kapan pendapatan atau beban dicatat dan diakui dalam laporan keuangan. Laporan Perhitungan laba atau sisa hasil usaha pada KPRI Mataram Pademawu dibuat dalam laporan keuangan tahunan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> H. Sahari, Bendahara KPRI Mataram Pademawu, Wawancara Langsung (12 Januari 2021)

**Gambar 3. 1 Laporan Laba rugi KPRI Mataram Pademawu**

NERACA RUGI LABA KPRI MATARAM KEC.PADEMAWU KAB.PAMEKASAN TAHUN BUKU 2018				
NO	URAIAN	DEBET	KREDIT	KETER
1	<b>PENDAPATAN</b>			
	JASA USP		520.690.680	
	JASA INVENTARIS		11.147.000	
	JASA BANK		5.843.547	
	PENDAPATAN LAIN-LAIN		10.382.000	
2	<b>PENGELUARAN</b>			
	BIAYA BUNGA KE BKE	71.498.010		
	BIAYA BUNGA KE BPR JTM	28.800.000		
	BIAYA BUNGA BPR			
	BIAYA BUNGA BNI	54.106.373		
	BIAYA BUNGA BSM	72.754.130		
	BIAYA ORGANISASI	6.400.000		
	BIAYA PERUSAHAAN	10.664.000		
	BIAYA UMUM	87.975.000		
	BIAYA TAMBAHAN LEBARAN			
	ADM/ FI GAJI	6.220.000		
	PAJAK	415.000		
	TRANSFER	56.500.000		
	<b>BIAYA RAT</b>	<b>152.510.714</b>		
	SHU	<b>547.843.227</b>	<b>547.843.227</b>	

PAMEKASAN 31 DESEMBER 2018  
BENDAHARA  
Sahari, S.A.G

KETUA  
M. MOH SAHID, MPd

SEKRETARIS  
SANIMAN, SPd, MMPd

Sumber: Dokumen KPRI Mataram Pademawu

Pada KPRI Mataram Pademawu pendapatan yang diperoleh bersumber dari pendapatan jasa USP, pendapatan provisi dan administrasi, pendapatan persewaan dan pendapatan jasa bank/bunga. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak H. Sahari selaku bendahara KPRI Matram Pademawu menyatakan bahwa:

“Sumber Pendapatannya yaitu dari USP, pendapatan inventaris, pendapatan jasa bank, dan pendapatan lain-lain, contohnya pendapatan administrasi atau provisi”<sup>78</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Samsul Arifin selaku karyawan KPRI Mataram Pademawu, beliau mengatakan bahwa:

“Pendapatan yang ada dalam Koperasi mataram, pertama yang jelas dari jasa anggota, kalau dalam lingkungan bank istilahnya pendapatan bunga. Yang kedua ada sewa, kalau dimataram inventaris persewaan seperti gedung dan peralatan pernikahan. Dan ada lagi yaitu pendapatan administrasi dari peminjam, sedangkan juga ada dari bank, tapi jumlahnya

<sup>78</sup> H. Sahari, Bendahara KPRI Mataram Pademawu, Wawancara Langsung (12 Januari 2021)

sangat kecil. Jadi, jasa dari bank sangat kecil karena juga ada pajak atau beban administrasi tabungan oleh bank”<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dan dokumen koperasi untuk sumber pendapatan dapat dipaparkan mengenai pendapatan untuk data tahun 2018, yaitu pendapatan USP tercatat dalam laporan laba rugi sejumlah Rp. 520.690.680. Jumlah tersebut diperoleh dari anggota yang melakukan pinjaman, dimana tiap pinjaman terdapat jasa yang harus dibayar sebesar 1,5% dari total dana pinjaman. Pendapatan sewa diakui dan dicatat sebesar Rp.11.147.000 dan pendapatan jasa bank diperoleh sebesar Rp. 5.643.547. Untuk pendapatan lain-lain tersebut diperoleh dari provisi dan administrasi anggota yang pinjam, dimana koperasi mengakui dan mencatat pendapatan pada saat pemberian awal pinjaman dengan persentase 1,3% dari dana pinjaman.

Dalam menunjang kelancaran usaha di KPRI Mataram, maka terdapat biaya-biaya yang di keluarkan baik itu yang berhubungan langsung dengan usaha ataupun tidak langsung terkait. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Samsul Arifin selaku karyawan koperasi menyatakan bahwa:

”Kalau beban yang umum yang jelas satu honor pengurus, pengawas dan karyawan dan ada lagi biaya pemotong gaji, pemotong gaji itu biasa dari koperasi, dimana koperasi memberi biaya untuk pemotong gaji dan ada lagi beban biaya untuk biaya pinjaman ke bank, ke BKE, Bank jatim, dimana diwajibkan bayar angsuran dan bunganya.”<sup>80</sup>

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh karyawan dan dokumen koperasi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh koperasi, yaitu terdapat biaya untuk honor pengurus, biaya untuk honor karyawan serta untuk honor pengawas dan honor untuk pemotong gaji sebesar 1% dari jumlah uang yang dipotong oleh pihak terkait, dimana honor ini diperoleh oleh pihak terkait pada saat telah terjadinya

<sup>79</sup> Samsul Arifin, Karyawan KPRI Mataram Pademawu, Wawancara Langsung (4 Januari 2021)

<sup>80</sup> Samsul Arifin, Karyawan KPRI Mataram Pademawu, Wawancara Langsung (4 Januari 2021)

pemotongan gaji. Kemudian, ada biaya untuk rapat pengurus, pembinaan pengawas dan biaya RAT. Sehingga jumlah untuk biaya tersebut tahun 2018 tersebut diketahui:

Honor Pengurus	: Rp. 25.600.000
Hono pengawas	: Rp. 10.100.000
Honor Pemotong Gaji	: Rp. 17.854.130
Honor Karyawan	: Rp. 14.400.000
Rapat Pengurus	: Rp. 3.000.000
Pembinaan Pengawas	: Rp. 1.800.000
Biaya RAT	: Rp. 56.500.000

Terdapat juga biaya perusahaan yang terdiri dari biaya untuk petugas persewaan, biaya pembinaan dan pengerjaan buku. Biaya umum terdiri dari biaya administrasi, biaya antar jemput uang, biaya rekening listrik, pembelian ATK, transport rapat-rapat. Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk admin tabungan bank, yang dipotong tiap bulannya oleh bank. Jumlah biaya-biaya tersebut, yaitu:

Petugas Persewaan	: Rp. 2.400.000
Pembinaan oleh instansi	: Rp. 1.000.000
Pengerjaan buku	: Rp. 3.000.000
Biaya administrasi	: Rp. 1.000.000
Biaya antar jemput uang	: Rp. 4.000.000
Biaya rekening listrik	: Rp. 1.654.000
Pembelian ATK	: Rp. 2.500.000

Biaya lain-lain ini terdiri dari biaya bunga ke bank, dimana biaya Bunga yang dibebankan pada tahun 2018 yaitu untuk bank BKE, ke bank BSM dan ke bank BPR Jatim. Dan terdapat juga biaya Transfer, pajak dan tambahan lebaran.

Maka diketahui jumlah biaya-biaya tersebut, yaitu:

Biaya Rapat-rapat	: Rp. 2.000.000
Biaya bunga BKE	: Rp. 71.498.010
Biaya BPR Jatim	: Rp. 28.800.000
Biaya bunga BSM	: Rp. 54.106.373
Biaya Pajak	: Rp. 6.220.000
Biaya transfer	: Rp. 415.000
Biaya Tambahan lebaran	: Rp. 87.975.000

Pada suatu proses pencatatan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan, mulai dari mengidentifikasi transaksi, menentukan kewajiban yang harus dipenuhi, penentuan jumlah, kemudian pencatatan transaksi tersebut. Tahapan pencatatan transaksi ini sangat penting karena hal ini merupakan langkah untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sahari selaku Bendahara KPRI Matarama Pademawu, bahwa untuk proses pencatatan di koperasi, yaitu:

“Pertama, kita kan menerima anggota yang mau pinjam, anggota yang mau bayar atau sebagainya, kita catat dalam buku untuk yang pinjam, yang simpanan tiap bulan kita catat, kita setor ke dinas untuk dipotong oleh dinas karena koperasi tidak bisa memotong gaji sendiri, dari dinas tiap bulan tiap tanggal 1 kita datang ke dinas untuk menerima uang yang dipotong dinas, kita masukkan ke buku kas, masukan lagi ke jurnal dan masukkan lagi ke *cashflow*, tiap tahun kita mengadakan RAT untuk

melaporkan perjalanan uang atau perputaran uang dalam satu tahun, untuk dipertanggung jawabkan.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara koperasi tersebut dapat dijabarkan bahwa pada KPRI Mataram Pademawu proses pencatatan aktivitas transaksinya dengan langkah yang pertama menelaah apakah anggota yang datang mau pinjam, menjadi anggota baru dan melakukan persewaan, jika tujuannya untuk melakukan pinjaman maka anggota harus melalui alur pinjaman berdasarkan gambar 2.2. Kemudian, uang/dana diberikan kepada anggota dan dibuat kwitansi bahwa dana telah diterima. Langkah selanjutnya adalah dari kwitansi tersebut koperasi mencatatnya pada bagian anggota yang akan dipotong gajinya, kemudian daftar peminjam tersebut akan dikirim ke dinas atau bendahara cabang dan bendahara sekolah. Kemudian pada tanggal 1 koperasi mengambil uang yang telah terkumpul, dimana setelah uang diterima koperasi mencatat di buku kas, jurnal memorial, cashflow dan laporan keuangan.

Dalam proses pencatatan tersebut, metode pengakuan pendapatan dan beban ini penting untuk diperhatikan, karena untuk menentukan kapan pendapatan dan beban itu akan dicatat dan sebagai dasar penentuan jumlah laba secara tepat. Dalam akuntansi terdapat 2 (dua) istilah metode pengakuan, yaitu basis kas dan basis akrual. Pengakuan dengan metode Basis kas merupakan pendapatan dan beban diakui ketika kas telah diterima atau dibayar, sedangkan untuk basis akrual pendapatn dan beban diakui walaupun kas belum diterima atau dibayar. Pada KPRI Mataram Pademawu dalam mengakui pendapatan dan bebannya menerapkan metode basis kas, dimana semua pendapatan dan beban yang dicatat

---

<sup>81</sup> H. Sahari, Bendahara KPRI Mataram Pademawu, Wawancara Langsung (12 Januari 2021)

ketika kas telah diterima dan dibayar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H. Sahari selaku bendahara KPRI Mataram Pademawu mengatakan bahwa:

“Ya itu kan basis ya, itu kita terima uang kita catat, kalau tidak terima uang masuk ke yang nunggak, artinya kita catat ke buku kas itu tiap pembayaran ketika terima uang, kalau tidak terima uang tidak dicatat dan kalau pengeluaran juga seperti itu”

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Samsul selaku karyawan KPRI

Mataram Pademawu bahwa:

“Kalau di koperasi Mataram sistemnya, begitu diterima uang langsung dicatat, artinya kami pakai sistem *cash basis*, jadi bukan sistem *akrual basis* tapi kas basisnya yang kami utamakan. Karena apa yang kami terima itu yang kami catat, begitu juga dengan pendapatan jasa atau angsuran dari anggota, semua sistemnya *cash basis*. Soalnya kami memang melakukan pencatatan ke buku kas kami mencatat yang telah diterima bukan yang akan kami terima tapi yang sudah diterima dan bukan hanya pendapatan semua uang masuk, angsuran, sewa apapun itu tetap kami menggunakan *cash basis*. ”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan informasi dari dokumen KPRI Mataram bahwa koperasi dalam pengakuan pendapatan dan beban menggunakan dasar kas. Misalkan, contoh kasus perolehan pendapatan pada KPRI Mataram yaitu pada tanggal 14 september 2018, anggota dengan nama Fathorahman melakukan pinjaman kepada koperasi sebesar Rp. 15.000.000 dengan lama angsuran 30 kali dan jasa/keuntungan 1,5% perbulan. Dari pinjaman tersebut dikenakan biaya provisi dan administrasi sebesar 1,3%. Pada saat realisasi pinjaman koperasi mataram mencatatnya pada buku kas harian, dimana untuk jumlah pinjaman di sisi debet, dan biaya provisi dan administrasi di sajikan dalam kolom tersendiri, serta koperasi tidak mencantumkan tanggal untuk realisasi pinjaman tersbut, hanya menyesuaikan bulan yang terjadi saat pinjaman.

---

<sup>82</sup> Samsul Arifin, Karyawan KPRI Mataram Pademawu, Wawancara Langsung(04 Januari 2021)

**Tabel 3. 1 Jurnal Realisasi Pinjaman**

Tanggal.	Keterangan	Provisi	Debet	Kredit
14/09/18	USP Fathorrahman (Piutang)	Rp. 195.000	Rp. 15.000.000	

Sumber: Dokumen KPRI Mataram

Untuk pembayaran angsurannya melalui potongan gaji oleh dinas kecamatan, dimana potongan gaji terjadi pada bulan berikutnya setelah realisasi dana pinjaman. Sehingga, berdasarkan kasus tersebut koperasi mencatat dan mengakui pendapatan ketika kas telah diterima dari pihak pemotong. Maka untuk pencatatan dalam jurnal koperasi, yaitu:

**Tabel 3. 2 Jurnal Penerimaan angsuran dan Penerimaan pendapatan jasa USP**

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Angsuran USP anggota		Rp. 500.000
	Jasa USP		Rp. 225.000

Sumber: dokumen KPRI Mataram

Pada pendapatan persewaan terdapat tarif/harga yang telah ditentukan oleh KPRI Mataram. Sehingga, hal tersebut dapat mempermudah pengukuran dalam penentuan pendapatan sewa. Harga barang sewaan tersebut, yaitu:



**Tabel 3. 3 Harga Persewaan**

No.	Nama	Anggota	Umum	Keterangan
1.	Kursi/buah	Rp. 500	Rp. 600	– Harga tersebut adalah harga ditempat – Harga untuk anggota khusus anggota tersendiri
2.	Piring/100 buah	Rp. 10.000	Rp. 15.000	
3.	Sendok/100 buah	Rp. 10.000	Rp. 15.000	
4.	Baki/ buah	Rp. 1.000	Rp. 1.000	
5.	Gedung	Rp. 500.000	Rp. 600.000	

Sumber: Dokumen KPRI Mataram

Untuk persewaan koperasi, misalkan pada bulan Februari terdapat 3 anggota yang melakukan persewaan, dengan rician:

**Tabel 3. 4 Transaksi Persewaan**

NAMA	ALAMAT	NAMA BARANG	JML BARANG	JML SEWA
Rudik	Paninggin	Kursi	1000	500.000
Rudik	Paninggin	Piring	1000	100.000
Rudik	Paninggin	Sendok	1000	100.000
Hamin	Asampitu	Kursi	300	150.000
Hamin	Asampitu	Piring	300	30.000
Hamin	Asampitu	Sendok	300	30.000

Yudik	Durbuk	Kursi	260	130.000
Total				1.040.000

Sumber: Dokumen KPRI Mataram

Pada saat terjadinya pesanan. KPRI Mataram mencatat jasa persewaan dalam sebuah kwitansi pesanan. Kemudian, ketika kas telah diterima seluruhnya untuk persewaan tersebut oleh koperasi, maka pendapatan tersebut dicatat dan diakui di buku kas dan jurnal. Koperasi menjurnal pendapatan sewa dengan menyatukan seluruh pendapatan, jadi tidak rinci perorangan.

**Tabel 3. 5 Jurnal Pendapatan Inventaris**

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
25/02/18	Penerimaan Inventaris		Rp. 1.040.000

Sumber: Dokumen KPRI Mataram

Total pendapatan sewa/inventaris yang diakui pada laporan laba rugi KPRI Mataram sebesar Rp. 11.147.00, jumlah pendapatan tersebut merupakan pendapatan dari bulan januari, februari, maret, juli, agustus, September, oktober, November, desember. Dan diketahui, ternyata pada bulan mei terdapat pendapatan sewa yang diperoleh koperasi, namun pada laporan laba rugi tidak diakui. Hal ini terjadi disebabkan pada bulan mei pendapatan sewa tidak dijurnal. Jumlah pendapatan sewa di bulan mei sebesar Rp. 1.930.000.

Untuk pendapatan jasa bank koperasi tidak melakukan penjurnalan, namun terdapat buku khusus penerimaan jasa bank tersebut. Koperasi mencatat

penerimaan jasa bank setiap bulannya ketika saldo penerimaan jasa bank telah dimasukkan ke buku rekening koperasi. Untuk pendapatan provisi dan administrasi, koperasi mencatat dan mengakui pada awal realisasi peminjaman.

Mengenai beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yaitu untuk biaya bunga ke bank koperasi mencatat dan mengakui beban tersebut tiap bulan, ketika telah melakukan pembayaran. Sama halnya dengan beban yang lain, ketika terjadi pengeluaran kas maka koperasi akan mencatat dan menjurnalnya. Untuk pengakuan beban, KPRI Mataram mencatatnya ketika kas telah dibayarkan. Misalkan pada pembayaran gaji, pada bulan juni dibayar gaji untuk pembantu umum yaitu H. Ganibuddin selama 6 bulan yaitu Rp. 3.000.000. Sehingga, proses pengakuan dan pencatatan beban tersebut dicatat ketika kas telah benar-benar dibayarkan.

**Tabel 3. 6 Jurnal Biaya Honor**

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
3/6/18	Honor H. Gani 6 bulan	Rp. 3.000.000	

Sumber: Dokumen KPRI Mataram

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan data lapangan dan kemudian memaparkannya sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan,

sehingga peneliti menemukan suatu hal sebagai hasil dari penelitian. Hasil temuan tersebut dijelaskan dalam bentuk narasi, yaitu sebagai berikut:

1. KPRI Mataram Pademawu merupakan jenis koperasi jasa keuangan, yang beranggotakan khusus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan dinas pendidikan. Pada koperasi ini untuk sumber pendapatannya yaitu dari Pendapatan Usaha simpan pinjam, usaha persewaan/inventaris, Pendapatan jasa bank dan pendapatan lainnya (Provisi dan Administrasi). Untuk sumber beban pada KPRI Mataram Pademawu diklasifikasikan menjadi beban organisasi, perusahaan, beban umum dan beban lain-lain.
2. Pada umumnya, dalam akuntansi terdapat dua metode pengakuan untuk pendapatan dan beban, yaitu pengakuan dengan dasar kas dan dasar akrual. Pengakuan dengan dasar kas adalah pendapatan dan beban diakui ketika kas telah diterima dan dibayar. Sebaliknya, dasar akrual yaitu pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, walaupun belum terjadi penerimaan kas dan pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian di KPRI Mataram Pademawu diketahui bahwa metode pengakuan pendapatan dan bebannya menggunakan dasar kas. Dasar kas tersebut diketahui bahwa pendapatan dan beban diakui ketika penerimaan kas telah diterima dan kas telah dikeluarkan. Sehingga, dalam proses pembukuan pendapatan dan beban, koperasi mencatatnya ke buku kas, jurnal umum, *cashflow* dan laporan keuangan ketika kas telah benar-benar diterima dan dibayar.
3. Batasan-batasan pada penelitian hanya berfokus pada metode pengakuan pendapatan dan beban pada laporan laba rugi di KPRI Mataram Pademawu untuk tahun 2018.

### C. Pembahasan

Dari Paparan data dan temuan penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban berdasarkan SAK ETAP dalam Penentuan Jumlah SHU pada KPRI Mataram Pademawu.

Metode pengakuan merupakan proses penentuan kapan suatu pos diakui atau dicatat dalam laporan keuangan. Berdasarkan SAK ETAP, pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan yaitu suatu proses pembentukan suatu akun dalam neraca atau laporan laba rugi yang telah memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria, yaitu kriterinya ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan akun tersebut akan mengalir ke entitas dan akun tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Penerapan pengakuan yang tepat akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mengacu pada SAK ETAP, menjelaskan bahwa dalam menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, sebuah entitas harus menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual tersebut, pos-pos diakui sebagai asset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.<sup>83</sup> Dengan demikian, dalam SAK ETAP dalam metode pengakuan pendapatan dan beban dianjurkan untuk menerapkan basis akrual.

Pada umumnya, dalam Akuntansi metode pengakuan dibagi menjadi dua dasar yaitu metode dasar kas/tunai dan dasar akrual. metode dasar kas adalah

---

<sup>83</sup> Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, 8.

transaksi mengenai pendapatan dan beban diakui pada saat telah terjadi penerimaan kas atau pengeluaran kas. Sedangkan untuk dasar akrual adalah pengakuan terjadi saat pengaruh transaksi tersebut telah terjadi, jika terjadi pemberian jasa, penjualan atau beban maka transaksi tersebut dicatat sebagai pendapatan atau beban tanpa memandang apakah kas telah diterima atau dikeluarkan.

Pada KPRI Mataram Pademawu dalam penerapan metode pengakuan pendapatan dan beban menggunakan dasar kas. Dimana untuk pendapatan dan beban diakui dan dicatat dalam pembukuan ketika kas telah diterima atau dibayarkan.

Berdasarkan SAK ETAP, definisi pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang berasal dari kegiatan normal suatu entitas dalam suatu periode pada saat arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari sumbangsih penanam modal. Dalam pengakuan pendapatan terdapat kriteria tertentu berdasarkan SAK ETAP, yaitu:

- (a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dan atau ke dalam entitas;
- (b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.<sup>84</sup>

Pada KPRI Mataram sumber pendapatannya, yaitu pendapatan USP, Pendapatan Persewaan, Pendapatan jasa bank dan pendapatan lainnya (provisi dan administrasi). Pendapatan jasa simpan pinjam merupakan pendapatan yang bersumber dari pelayanan ke anggota dari peminjaman dana ke koperasi.

---

<sup>84</sup> Indonesia, 7.

Pendapatan jasa simpan pinjam ini merupakan sumber pendapatan utama pada KPRI Mataram. Pendapatan jasa USP di KPRI Mataram Pademawu menetapkan jasa/keuntungan dari usaha pinjaman yaitu sebesar 1,5%, dimana angsuran dan jasa dibayar setiap bulan. Cara perhitungan pendapatannya yaitu besar pinjaman dikalikan persentase jasa dan angsurannya dihitung dengan cara jumlah dana pinjaman dibagi dengan batas waktu peminjaman.

Berpedoman pada SAK ETAP, yang menyatakan bahwa pendapatan seharusnya diakui secara basis akrual. Misalkan dari kasus sebelumnya, anggota fathorrahman melakukan pinjaman pada tanggal 14 September dengan angsuran Rp. 500.00 dan jasa Rp. 225.000, untuk angsuran dan jasanya tersebut dibayar pada bulan berikutnya, sehingga secara akrual pendapatan harus telah diakui dan dicatat pada saat jatuh temponya walaupun belum ada kas masuk. Sehingga contoh jurnal dari kasus pendapatan tersebut yaitu:

**Tabel 3. 7 Pendapatan Akrual USP**

Tgl	Nama Akun	Debit	Kredit
1/10/18	Pendapatan Jasa yang akan diterima (Piutang Jasa pinjaman)	Rp. 225.000	
	Pendapatan USP		Rp. 225.000

Sumber: Data Olahan Penulis

Untuk jurnal pada saat telah menerima pembayaran, misalkan pendapatan yang telah jatuh tempo tersebut dibayar pada tanggal 1 Januari 2019 maka jurnalnya yaitu:





Pendapatan inventaris adalah pendapatan dari persewaan barang, seperti kursi, baki, gedung, sendok, dan piring. Pada KPRI Mataram, pendapatan ini diakui ketika kas telah dibayar oleh anggota atau non anggota yang telah mengembalikan barang sewaan. Tercatat pendapatan sewa yang diakui koperasi sebesar Rp. 11.147.000 untuk tahun 2018. Dari hasil penelitian, terdapat pendapatan sewa yang tidak diumumkan, sehingga mengakibatkan jumlah pendapatan sewa tersebut tidak diakui dalam laporan laba rugi. Pendapatan sewa yang tidak diakui tersebut terjadi pada bulan mei dimana koperasi telah menerima kas dari anggota yang melakukan persewaan namun tidak diumumkan. Jumlah pendapatan sewa yang tidak diakui tersebut sebesar Rp. 1.930.000. Sehingga, pada laporan laba rugi KPRI Mataram pendapatan sewa yang diakui lebih rendah dari pada yang sebenarnya. Dengan demikian, total pendapatan sewa yang seharusnya diakui koperasi sebesar Rp. 13.077.0000. Maka terdapat jurnal koreksi untuk pendapatan sewa pada bulan mei, yaitu:

**Tabel 3. 9 Jurnal koreksi pendapatan inventaris**

Tgl	Nama Akun	Debit	Kredit
31/05/18	Kas	Rp. 1.930.000	
	Pendapatan sewa/inventaris		Rp. 1.930.000

Sumber: Data olahan Penulis

**Tabel 3. 10 Rincian Pendapatan inventaris**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pendapatan (Rp)</b>
Januari	1.090.000
Februari	925.000
Maret	1.040.000
April	-
Mei	1.930.000
Juni	-
Juli	1.925.000
Agustus	1.777.000
September	1.740.000
Oktober	1.020.000
November	675.000
Desember	955.000
Total	13.077.000

Sumber: Data Olahan Penulis

Sumber pendapatan selanjutnya pada KPRI Mataram yaitu pendapatan jasa bank. Pendapatan ini merupakan pendapatan diluar usaha koperasi dan pendapatan yang menjadi sumbangsih dalam penambahan laba dilaporan laba rugi. Pendapatan jasa bank ini diperoleh oleh koperasi karena terdapat sejumlah uang yang disimpan atau ditabung di bank. Perolehan pendapatan bunga ini sangat kecil, karena sejatinya koperasi hanya menabung di Bank bukan melakukan investasi. Pendapatan jasa bank untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 5.643.547.

Pendapatan jasa bank ini diterima dari bank BSM sebesar Rp. 424.364, BPR sebesar Rp. 700.000 dan dari bank BPD sebesar Rp. 4.519.182. Berdasarkan SAK ETAP, pengakuan pendapatan jasa bank ini sudah sesuai, karena koperasi mengakui berdasarkan jumlah yang telah diterima pada periode terjadinya.

Pendapatan lain-lain ini bersumber dari pendapatan provisi dan administrasi. Provisi dan administrasi merupakan biaya atau kewajiban yang harus dibayar oleh anggota yang berkaitan dengan proses perjanjian pinjaman. Pendapatan ini diperoleh saat dana pinjaman direalisasikan dan dipotong 1 kali pada awal pemberian dana dengan persentase 1,3% dari total dana pinjaman. Mengacu pada SAK ETAP, untuk pendapatan belum sepenuhnya sesuai dimana pendapatan provisi dan administrasi juga harus diakui secara akrual dan berdasarkan pada paragraf 21.1 huruf (c) menjelaskan bahwa biaya pinjaman mencakup amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian peminjaman. Sehingga, biaya provisi dan administrasi yang telah diterima dari peminjaman harus ditangguhkan terlebih dahulu secara garis lurus selama masa pengkreditan. Maka pendapatan ini diakui ketika sudah jatuh tempo dan diperhitungkan bersama dengan pendapatan jasa simpan pinjam dan angusurannya. Misalkan mengacu pada kasus sebelumnya Misalkan, anggota Fathorrahman meminjam dana di KPRI Mataram Rp. 15.000.000 dengan angusran 30 kali, maka provisi dan administrasinya adalah Rp. 195.000. Maka jurnal untuk penerimaan pendapatan provisi dan administrasi yang terima dikmuka pada saat realisasi peminjaman, yaitu:

**Tabel 3. 11 Jurnal Pendapatan Provisi dan Administrasi diterima dimuka**

Tgl	Nama Akun	Debit	Kredit
14/9/18	Piutang Anggota USP	Rp. 15.000.000	
	Kas		Rp. 14.805.000
	Provisi dan administrasi diterima dimuka		Rp. 195.000

Sumber: Data Olahan Penulis

Jurnal untuk amortisasi provisi dan administrasi yang akan diakui selama masa pengkreditan dan dihitung secara garis lurus, dan diakui pada waktu bersamaan pembayaran angsuran dan jasa di bulan berikutnya. Maka jurnal pendapatan provisi dan administrasi, yaitu:

**Tabel 3. 12 Jurnal pendapatan provisi & adm. Yang telah diamortisasi**

Tgl	Nama Akun	Debit	Kredit
1/10/18	Provisi dan adm. diterima dimuka	Rp. 6.500	
	Pendapatan Lainnya (provisi & adm.)		Rp. 6.500

Sumber: Data olahan Penulis

Berdasarkan laporan tahun 2018 KPRI Mataram pademawu mengakui pendapatan provisi dan administrasi sebesar Rp. 10.362.000, dimana koperasi mengakui pendapatan ini diawal pemberian dana ke anggota. Jika disesuaikan dengan SAK ETAP, maka pendapatan provisi dan amortisasi ini harus

ditanggihkan terlebih dahulu. Dengan demikian diperoleh pendapatan diterima dimuka untuk provisi dan administrasi untuk data tahun 2018 sebesar Rp. 7.577.375 dan untuk mengakui pendapatan provisi dan administrasi yang telah diamortisasi, yaitu:

Pendapatan diterima dimuka	Rp. 2.784.625
Pendapatan Lainnya (provi&Adm.)	Rp. 2.784.625

Berdasarkan SAK ETAP menjelaskan bahwa beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.<sup>85</sup> Untuk biaya pinjaman berdasarkan SAK ETAP menyebutkan bahwa entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai beban pada laporan laba rugi pada periode terjadinya.<sup>86</sup> Serta, sama halnya dengan pendapatan, mengacu pada SAK ETAP bahwa beban juga diakui secara akrual. Dimana beban diakui saat kewajiban untuk membayar telah terjadi walaupun kas belum dibayar.

Secara umum, beban dibagi menjadi dua, yaitu beban operasional dan beban non operasional. Beban operasional adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan utama koperasi. Misalnya, beban gaji, beban sewa kantor, dan lain-lain. sedangkan untuk beban non operasional adalah beban yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan perusahaan, contohnya beban pajak, beban administrasi bank, dll.

---

<sup>85</sup> Indonesia, 8.

<sup>86</sup> Indonesia, 83.

Pada KPRI Mataram Pademawu terdapat beban organisasi, beban perusahaan, beban umum dan beban lain-lain. Berdasarkan klasifikasi beban tersebut untuk beban organisasi lebih baik diubah dan diberi nama akun yaitu beban operasional, karena beban organisasi berhubungan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan utama koperasi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan utama koperasi tersebut yaitu terdapat biaya yang mencakup beban honor/gaji pengurus, pengawas, karyawan, pemotong gaji, biaya rapat pengurus, pembinaan dan biaya RAT. Untuk beban perusahaan disini, lebih baik diberi nama akun beban non operasional, karena koperasi bukan sebuah perusahaan sehingga biaya-biaya tersebut lebih baik diklasifikasikan ke beban non operasional. Biaya tersebut meliputi beban yang berhubungan dengan honor untuk petugas persewaan, pembinaan dan pengerjaan buku. Kemudian terdapat beban umum yang terdiri dari biaya administrasi, biaya antar jemput uang, biaya rekening listrik, pembelian ATK dan transportasi rapat-rapat. Serta, Untuk beban lain-lain ini merupakan beban yang dikeluarkan mencakup biaya bunga ke bank, biaya pajak, biaya transfer dan biaya tambahan lebaran.

Secara basis akrual, beban diakui ketika telah terjadinya kewajiban bagi perusahaan untuk membayarnya, walaupun belum terjadinya pembayaran atas kewajiban tersebut, sehingga beban yang diakui tersebut membentuk akun utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Misalkan contoh pada kasus sebelumnya, yaitu pada bulan juni dibayar gaji untuk pembantu umum yaitu H. Ganibuddin selama 6 bulan yaitu Rp. 3.000.000. Sehingga, jurnal sebelum terjadinya pembayaran gaji dan setelah pembayaran gaji, yaitu:

**Tabel 3. 13 Jurnal Utang Biaya Honor**

Tgl	Nama Akun	Debit	Kredit
2/6/18	Biaya Honor	Rp. 3.000.0000	
	Utang Honor		Rp. 3.000.000

Sumber: Data olahan Penulis

**Tabel 3. 14 Jurnal pembayaran Utang Biaya Honor**

Tgl	Nama Akun	Debit	Kredit
3/6/18	Utang Honor	Rp. 3.000.0000	
	Kas		Rp. 3.000.000

Sumber: Data olahan Penulis

Secara terperinci biaya honor yang dikeluarkan pada KPRI Mataram Pademawu yaitu untuk bulan januari ketua memperoleh honor sebesar Rp.550.000, bendahara Rp. 500.000, Pembantu umum Rp. 500.000 dan Sekretaris Rp. 400.000. untuk pengawas sebesar Rp. 750.000, dan untuk karyawan Rp. 1.200.000. Pada bulan berikutnya hingga akhir periode beban untuk honor pengurus sebesar Rp. 2.150.000 dengan pembagian 4 pengurus yaitu ketua Rp. 600.000, bendahara 1 Rp. 550.000, Pembantu umum Rp. 500.000 dan sekretaris Rp. 500.000. Biaya untuk honor karyawan yaitu karyawan 1 sebesar Rp. 850.000 dan honor karyawan 2 sebesar Rp. 350.000, serta untuk honor pengawas yaitu Rp.

850.000. Beban honor tersebut pada akhir periode pelaporan laba rugi, koperasi telah mengakui dan menyelesaikan pembayaran honor secara kas.

Biaya yang dikeluarkan koperasi juga terdapat biaya untuk rapat pengurus, biaya pembinaan pengawas dan RAT tahunan. Biaya tersebut diakui oleh koperasi pada saat biaya telah terjadi dan dibayarkan. Berdasarkan SAK ETAP, untuk biaya-biaya tersebut sudah sesuai karena beban diakui pada saat terjadinya dan diukur dengan andal sesuai dengan kebutuhan koperasi. Sehingga diperoleh keseluruhan biaya yang dikeluarkan koperasi selama periode tahun 2018, yaitu:

Honor Pengurus	: Rp. 25.600.000
Hono pengawas	: Rp. 10.100.000
Honor Pemotong Gaji	: Rp. 17.854.130
Honor Karyawan	: Rp. 14.400.000
Rapat Pengurus	: Rp. 3.000.000
Pembinaan Pengawas	: Rp. 1.800.000
Biaya RAT	: Rp. 56.500.000

Biaya nonoperasional yaitu untuk honor petugas persewaan, koperasi mengakui beban tersebut pada akhir periode, hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Karena, pada saat terjadinya pesanaan persewaan barang pasti terdapat beban untuk petugas yang khusus menangani barang sewaan tersebut, seharusnya koperasi langsung mengakui beban tersebut pada saat telah diselesaikan jasa persewaan. Namun untuk pengukurannya diakhir periode sudah



diakui dan dibayar seluruhnya yaitu sebesar Rp. 2.400.000, sesuai dengan jumlah yang menjadi hak petugas persewaan.

Biaya pembinaan oleh instansi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat telah berlangsungnya pembinaan oleh dinas koperasi, PKPRI dan dinas terkait lainnya, sehingga saat pembinaan pasti terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini koperasi catat dan diakui pada saat periode terjadinya pembinaan. Untuk biaya pengerjaan buku, kas dikeluarkan saat terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk pengerjaan pembukuan seperti jurnal, administrasi, dan lain-lain. Tiap bulan pasti ada pengeluaran untuk pengerjaan buku, sehingga berdasarkan SAK ETAP ini sudah sesuai karena dicatat dan diakui pada saat penurunan asset telah terjadi.

Biaya umum yang terdiri dari biaya administrasi, biaya antar jemput uang, biaya rekening listrik, pembelian ATK dan transpot rapat-rapat. Biaya administrasi merupakan biaya yang timbul dari tabungan koperasi dibank, dimana biaya ini dipotong tiap bulan dibuku rekening KPRI Mataram Pademawu. Untuk biaya antar jemput uang dikeluarkan ketika pengurus melakukan penarikan uang ke bank, dimana hal itu pasti terdapat biaya yang dikeluarkan, baik itu untuk transpot dan makan. Untuk biaya rekening listrik koperasi membayar biaya tersebut tiap bulan ke kantor pos. Untuk biaya listrik ini koperasi bayar tanpa menunggu jatuh tempo penagihan dan dicatat dan diakui tiap bulannya. Tiap bulan dibayar sekitar Rp. 97.000. Berdasarkan pada SAK ETAP, pengakuan beban tersebut telah sesuai dimana beban diakui pada saat telah terjadi penurunan asset berupa kas dan dapat diukur dengan andal. Sehingga, diperoleh biaya umum, yaitu:

Biaya administrasi	: Rp. 1.000.000
Biaya antar jemput uang	: Rp. 4.000.000
Biaya rekening listrik	: Rp. 1.654.000
Pembelian ATK	: Rp. 2.500.000
Biaya Rapat-rapat	: Rp. 2.000.000

Untuk beban lain-lain ini merupakan beban yang dikeluarkan mencakup biaya bunga ke bank, biaya pajak, biaya transfer dan biaya tambahan lebaran. Mengenai beban atau biaya pinjaman sebagaimana yang telah diatur dalam SAK ETAP paragraf 21.2 bahwa koperasi harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai beban pada laporan laba rugi pada periode terjadinya. Pada KPRI Mataram Pademawu untuk pembayaran angsuran beserta bunga bank dilakukan setiap bulan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh bank yang terkait. Koperasi mengakui beban bunga pinjaman dalam laporan keuangan selama setahun yaitu sebesar Rp. 71.498.010 untuk bank BKE, Rp. 28.800.000 untuk Bank BPR Jatim dan Rp. 54.106.373 ke Bank BSM. KPRI mengakui beban ini tiap bulannya secara konsisten. Berdasarkan SAK ETAP, pengakuan beban yang dilakukan koperasi telah sesuai, dimana koperasi mengakui beban pada saat beban telah terjadi atau kewajiban membayar sudah terjadi dan jumlah beban seluruhnya telah diakui dalam laporan laba rugi. Rincian biaya bunga bank perbualannya sebagai berikut:

**Tabel 3. 15 Biaya Bunga Ke Bank**

Bulan	Bank BKE	BSM
Januari	Rp 7.788.810	Rp 5.770.295,46

Februari	Rp 7.470.900	Rp 5.549.595,25
Maret	Rp 7.148.670	Rp 5.326.366,19
April	Rp 6.822.030	Rp 5.100.579,29
Mei	Rp 6.490.920	Rp 4.872.205,25
Juni	Rp 6.155.280	Rp 4.641.214,42
Juli	Rp 5.815.020	Rp 4.407.576,83
Agustus	Rp 5.470.110	Rp 4.171.262,13
September	Rp 5.120.520	Rp 3.932.239,67
Oktober	Rp 4.766.130	Rp 3.690.478,40
November	Rp 4.406.910	Rp 3.445.946,96
Desember	Rp 4.042.710	Rp 3.198.613,59
Total	71.498.010	54.106.373

Sumber: Data Olahan Penulis

KPRI Mataram Pademawu telah berbadan hukum, sehingga koperasi telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP : 02.600.460.6-608.000. Sehingga, koperasi memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Untuk biaya pajak dibayar sesuai jumlah yang ditentukan oleh kantor pajak dan diakui pada saat kas telah dibayar, KPRI Mataram untuk pajak dikenakan PPh Final atau pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sekitar Rp. 500.000 jumlah pajak perbulan yang dibayar oleh koperasi ke kantor pajak. Sehingga, total biaya pajak setahun untuk tahun 2018 sebesar Rp. 6.220.000. Untuk penyajiannya akun beban pajak ini sudah sesuai, karena Berdasarkan SAK ETAP paragraf 24.4, Untuk biaya pajak koperasi menyajikan secara terpisah dari komponen beban lainnya.

Biaya tambahan lebaran anggota merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tunjangan lebaran, biaya tambahan ini untuk kesejahteraan anggota dan berdasarkan RAT tahunan bahwa anggota sepakat bahwa untuk uang lebaran ditambah sebesar Rp. Rp. 220.000. Beban diakui ketika kewajiban membayar uang lebaran telah terjadi dan kas telah dikeluarkan pada periode terjadinya. Dan untuk biaya transfer merupakan biaya yang dikeluarkan koperasi saat melakukan transfer saldo ke bank.

Berikut merupakan penyajian laporan keuangan laba rugi pada KPRI Mataram dan disajikan berdasarkan SAK ETAP untuk data tahun 2018, yaitu:

**Tabel 3. 16 Laporan laba rugi berdasarkan SAK ETAP  
Tahun buku 2018**

<b>Nama Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Pendapatan:		
Jasa USP		Rp. 538.605.180
Jasa Inventaris:		Rp. 13.077.000
Jasa Bank		Rp. 5.643.547
Pendapatan lain-lain		Rp. 2.784.625
Total Pendapatan		Rp. 560.110.352
Pengeluaran:		
Biaya bunga ke BKE	Rp. 71.498.010	
Biaya Bunga ke BPR Jatim	Rp. 28.800.00	
Biaya bunga BSM	Rp. 54.106.373	

Biaya Operasional	Rp. 72.754.130	
Biaya Nonoperasional	Rp. 6.400.000	
Biaya Umum	Rp. 10.664.000	
Biaya Tambahan Lebaran	Rp.87.975.000	
Biaya Pajak	Rp. 6.220.000	
Biaya Transfer	Rp. 415.000	
Biaya RAT	Rp. 56.500.000	
Total pengeluaran		(Rp. 395.332.513)
SHU		Rp. 164.777.839

Sumber: Data Olahan Penulis

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sisa hasil usaha berdasarkan SAK ETAP menghasilkan SHU sejumlah Rp. 164.777.839, terdapat perbedaan dengan SHU dengan perhitungan di KPRI Mataram Pademawu, yaitu SHU pada KPRI Mataram Pademawu diperoleh sebesar Rp. 152.510.714, sedangkan berdasarkan SAK ETAP sejumlah Rp. 164.777.839, selisihnya sebesar Rp. 12.267.125. Perbedaan tersebut diakibatkan karena berdasarkan SAK ETAP untuk metode pengakuan pendapatan harus menggunakan basis akrual, dimana pendapatan diakui walaupun belum terjadinya penerimaan kas. Sehingga, pendapatan yang telah jatuh tempo tapi belum diterima pembayarannya tetap diakui sebagai pendapatan. Serta perbedaannya juga terletak pada jumlah pengakuan pendapatan sewa dan pendapatan provisi dan administrasi, dimana untuk pendapatan sewa koperasi tidak mengakui pendapatan yang terjadi dibulan mei dan pendapatan untuk provisi dan administrasi tidak ditangguhkan terlebih dahulu.

Pembahasan mengenai dasar pengakuan pendapatan yang dianjurkan menggunakan dasar akrual, terdapat kriteria pengakuan untuk pendapatan dan beban yang harus dipenuhi dalam SAK ETAP. Berdasarkan SAK ETAP paragraf 2.24, menjelaskan bahwa entitas harus mengakui pendapatan, ketika:

- (a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas
- (b) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

Dari hasil penelitian pada KPRI Mataram untuk pendapatan jasa simpan dari kriteria SAK ETAP yang merujuk pada huruf (a) di atas dari pernyataan tersebut untuk kriteria pada KPRI Mataram sudah sesuai, dimana pada KPRI Mataram telah mengakui pendapatan dan menerima manfaat dari kegiatan jasa simpan pinjam tersebut berupa kas yang diterima koperasi dan pada huruf (b) berdasarkan hasil penelitian koperasi belum sepenuhnya sesuai, karena koperasi mengukur jumlah pendapatan ketika kas telah benar-benar diterima, sehingga untuk piutang pendapatan yang terjadi tidak diukur seluruhnya.

Untuk kriteria pengakuan pendapatan inventaris yaitu jumlah pendapatan yang berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk pengakuan pendapatan sewa ini koperasi telah mengakui dan menerima manfaatnya berupa kas dan untuk pengukurannya belum sepenuhnya sesuai, karena dari hasil penelitian untuk pendapatan sewa tersebut diketahui masih terdapat pendapatan sewa yang belum diakui pada periode terjadinya. Untuk pendapatan jasa bank, dari hasil penelitian koperasi telah mengakui pendapatan jasa bank ini ketika manfaat ekonomisnya

sudah diterima oleh koperasi yaitu berupa kas dan jumlah pendapatan telah diukur dengan andal sesuai dengan hak yang harus diterima koperasi.

Untuk Pendapatan lain-lain yang diperoleh dari provisi dan administrasi pinjaman sudah sesuai dimana koperasi telah mengukur dengan andal dan menerima manfaat dari pendapatan ini berupa kas masuk, namun berdasarkan SAK ETAP harus dilakukan amortisasi secara garis lurus sesuai dengan paragraf 21.1 huruf (c) biaya pinjaman mencakup amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian peminjaman.

Mengenai pengakuan beban atau biaya berdasarkan SAK ETAP pada paragraf 2.33 menjelaskan bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus menggunakan dasar akrual. dimana dalam dasar akrual pos diakui beban ketika memenuhi definisi dan kriteria. Serta sama halnya dengan pendapatan kriteria untuk beban tersebut berdasarkan paragraph 2.24 pos beban diakui ketika memenuhi: ada kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan pos akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Berdasarkan hasil analisis pada KPRI Mataram Pademawu belum sepenuhnya sesuai, naaamun untuk kriteria sudah sesuai dimana terdapat nilai yang telah diukur dengan andal dan koperasi telah menerima manfaatnya.

Dari hasil penelitian terdapat dampak akuntansi yang terjadi. Dampak dari perbedaan penerapan kebijakan dasar pengakuan yaitu antara dasar kas dan dasar akrual. Pada umumnya di Indonesia basis yang dikehendaki untuk diterapkan adalah basis akrual. Karena basis ini memberikan keunggulan berupa

informasi yang terdapat pada laporan keuangan lebih akurat, karena semua transaksi dicatat dan diakui walaupun kas belum diterima, sehingga laporan yang dihasilkan lebih transparan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam suatu perusahaan, serta memberikan kontribusi yang lebih relevan dalam pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. Berdasarkan kebijakan penerapan basis kas pada KPRI Mataram, dampak yang terjadi yaitu transaksi dicatat dan diakui ketika kas telah benar-benar diterima, sehingga dari hasil penelitian terdapat pendapatan yang tidak diakui koperasi padahal kas telah diterima. Oleh karena itu, dampak positif penerapan pengakuan dengan dasar akrual yaitu semua transaksi yang terjadi dicatat secara detail, meminimalisir adanya pos-pos yang tidak diakui serta meminimalisir adanya kecurangan atau salah saji, sehingga dasar akrual ini perlu dan dianjurkan untuk diterapkan.